

TAHAPAN DAN SCENARIO KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO, MESSO, DAN MIKRO

Ani Nursehah¹, Ratu Ananda Diana Putri², Anis Fauzi³

Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: aninursehah79@gmail.com¹, ratuananda012@gmail.com²,
anis.fauzi@uinbanten.ac.id

ABSTRAK

Secara umum, tahapan dan skenario kebijakan pendidikan makro, meso, dan mikro mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Pada tingkat makro, kebijakan pendidikan mencakup kerangka kerja nasional yang meliputi undang-undang, peraturan, dan standar pendidikan yang berlaku di seluruh negara. Kebijakan makro ini menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan pada tingkat meso dan mikro. Namun, meskipun kerangka kerja makro telah ditetapkan, masih terdapat tantangan dan kesenjangan yang perlu diatasi. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kesenjangan aksesibilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Selain itu, kualitas pendidikan juga menjadi perhatian utama, termasuk kurangnya ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian literatur atau analisis literatur. Analisis literatur dalam metode kualitatif biasanya berfokus pada pemahaman mendalam tentang konsep, teori, dan prinsip yang terkait dengan topik penelitian. Hasil yang diperoleh yaitu diperlukan solusi yang komprehensif dan terkoordinasi di berbagai tingkatan kebijakan. Pada tingkat meso, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan regional dapat mengembangkan program-program khusus yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Sementara itu, pada tingkat mikro, lembaga pendidikan seperti sekolah dan madrasah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan potensi individu serta memastikan adanya lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya saing. Salah satu cara untuk merencanakan strategi secara efektif adalah dengan menggunakan analisis SWOT, yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Selain itu, CBA digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan, Tahapan, Makro, Messo, Mikro*

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan memiliki signifikansi yang besar karena pendidikan menjadi kebutuhan esensial bagi masyarakat yang memiliki beragam substansi dan ragam penyelenggaraan. Pendidikan secara tegas terkait dengan beragam nilai, seperti agama, kepercayaan, adat istiadat, suku/ras, ekonomi, sosial budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan.

Kebijakan pendidikan muncul sebagai respons terhadap masalah-masalah yang timbul dalam sektor pendidikan (Sutapa, 2008). Permasalahan ini seringkali terjadi karena adanya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dan tujuan pendidikan (Suyahman, 2016). Kebijakan pendidikan merupakan upaya untuk merumuskan langkah-langkah dan proses penyelenggaraan pendidikan dengan menjelaskan visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan (Fatkuroji, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang berhubungan dengan sektor pendidikan dalam upaya menguraikan visi dan misi pendidikan guna mencapai tujuan-tujuan pendidikan (2008) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan terkait dengan bagaimana pengeluaran dalam pendidikan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Bakry (2010) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan meliputi pengelolaan aspek spesifik dalam pendidikan, termasuk alokasi, penyerapan, dan distribusi sumber daya untuk implementasi pendidikan serta pengelolaan praktik-praktik pendidikan melalui strategi-strategi implementasi yang tepat. Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berkembang dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan, pemerintah dan stakeholder terlibat secara aktif dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak hanya mencakup aspek nasional, tetapi juga memperhatikan dimensi regional dan lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami tahapan dan skenario kebijakan pendidikan pada tingkat makro, meso, dan mikro.

Secara umum, tahapan dan skenario kebijakan pendidikan makro, meso, dan mikro mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Pada tingkat makro, kebijakan pendidikan mencakup kerangka kerja nasional yang meliputi undang-undang, peraturan, dan standar pendidikan yang berlaku di seluruh negara. Kebijakan makro ini menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan pada tingkat meso dan mikro.

Namun, meskipun kerangka kerja makro telah ditetapkan, masih terdapat tantangan dan kesenjangan yang perlu diatasi. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kesenjangan aksesibilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Selain itu, kualitas pendidikan juga menjadi perhatian utama, termasuk kurangnya ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan terkoordinasi di berbagai tingkatan kebijakan. Pada tingkat meso, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan regional dapat mengembangkan program-program khusus yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Sementara itu, pada tingkat mikro, lembaga pendidikan seperti sekolah dan madrasah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan potensi individu serta memastikan adanya lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya saing.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian literatur atau analisis literatur. Analisis literatur dalam metode kualitatif biasanya berfokus pada pemahaman mendalam tentang konsep, teori, dan prinsip yang terkait dengan topik penelitian. Melalui analisis literatur, peneliti dapat mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis informasi atau teori yang relevan dengan topik penelitian tanpa harus mengumpulkan data primer atau melakukan pengukuran statistik.

Dalam konteks artikel tahapan dan skenario kebijakan pendidikan pada tingkat makro, meso, dan mikro, analisis literatur kualitatif memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman tentang menjadi hal penting dalam upaya

meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan secara holistik dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan terwujudnya sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mampu memenuhi tuntutan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pendidikan dengan menggunakan data sebagai salah satu elemen penting dalam merumuskan berbagai alternatif kebijakan dalam konteks pengambilan keputusan yang memiliki dimensi politis, guna mengatasi berbagai tantangan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, lingkup kebijakan pendidikan mencakup seluruh ranah pendidikan, baik secara nasional maupun lokal. Lingkup kebijakan pendidikan nasional mencakup semua komponen pendidikan dalam negara, sementara lingkup kebijakan pendidikan daerah mencakup area-area tertentu di tingkat lokal.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan bagian integral dari proses pembuatan kebijakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasbuallah (2015). Dalam proses pembuatan kebijakan yang melalui berbagai tahapan politik, terdapat aktivitas politik yang terjadi dalam proses pembuatan kebijakan, yang disusun dalam serangkaian tahap yang saling terkait dan diatur berdasarkan urutan waktu. Penyusunan agenda, formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan pendidikan secara rinci mengilustrasikan fase-fase dan karakteristik dari pembuat kebijakan, di mana implementasi menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Ada tiga tingkatan kebijakan yang merujuk pada tingkat perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yaitu kebijakan makro, meso, dan mikro. Kebijakan makro dalam pendidikan mencakup regulasi seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003 dan Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Kebijakan makro ini menjadi landasan bagi perumusan kebijakan pada tingkat meso dan mikro. Perumusan kebijakan pada tingkat meso dan mikro harus mempertimbangkan kebijakan pada tingkat makro.

Kebijakan mikro terkait dengan kebijakan yang berlaku di institusi, perusahaan, organisasi, komunitas, atau kelompok tertentu dalam sektor pendidikan, seperti sekolah, madrasah, atau pesantren. Kebijakan mikro hanya berlaku di lingkungan spesifik tersebut dan tidak memiliki dampak pada pihak di luar lingkup tersebut. Sebagai ilustrasi, kebijakan mengenai penggunaan kerudung di sekolah yang berbasis agama hanya berlaku di institusi tersebut dan tidak memiliki pengaruh di sekolah lain di luar lingkungan tersebut.

B. Tahapan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan dan langkah-langkah yang mengikuti tahapan tertentu yang diatur menurut urutan waktu. Dunn (2000:24) menyatakan bahwa rangkaian keputusan dan langkah-langkah tersebut terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahapan Identifikasi Masalah.

Menurut Dunn (2000:226), tahapan ini merupakan proses yang melibatkan empat fase yang saling terkait, yaitu pencarian masalah (*problem search*), definisi masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*), dan pengenalan masalah (*problem sensing*). Pentingnya tahapan ini ditandai dengan pengakuan atau kesadaran akan adanya situasi yang dianggap sebagai masalah.

Dalam mengidentifikasi masalah kebijakan, ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan (Darwin, 1995:2-4), seperti: (a) relevansi dengan kepentingan masyarakat luas, (b) tingkat kepentingan yang serius, di mana situasi harus dianggap sebagai masalah kebijakan jika tidak boleh diabaikan, (c) potensi untuk menjadi serius di masa depan, meskipun mungkin saat ini belum menjadi masalah yang serius, namun di masa depan akan menjadi serius, (d) ada peluang untuk perbaikan.

2. Tahapan Pemilihan Agenda.

Tahapan ini memerlukan persyaratan tertentu agar suatu masalah dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, seperti dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan kebutuhan untuk penanganan segera.

3. Tahapan Perumusan Kebijakan.

Pada tahap ini, dilakukan perumusan usulan kebijakan yang melibatkan aktivitas pendidik dalam mengembangkan serangkaian proposal kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah (Islamy, 2001: 92).

4. Tahapan Pengadopsian Kebijakan.

Tahap ini merupakan saat kebijakan diadopsi dengan dukungan mayoritas penyusun kebijakan setelah pertimbangan apakah keputusan tersebut akan diterima atau tidak oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Soenarko (1998:179) menyatakan bahwa jika rancangan kebijakan tidak diterima, maka perlu direformulasi atau bahkan ditolak sama sekali. Namun, jika diterima, maka rancangan kebijakan tersebut disahkan dan diimplementasikan.

5. Tahapan Implementasi Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan, akan timbul hambatan atau tantangan yang menghalangi pencapaian tujuan pendidikan. Dari semua tahapan dalam perumusan kebijakan pendidikan, tahap implementasi merupakan tahap yang paling kompleks dan rumit. Hal ini disebabkan oleh perlunya kerjasama yang solid antara berbagai elemen, baik dari pihak pusat maupun daerah. Skenario Analisis Kebijakan Proses pelaksanaan kebijakan pendidikan umumnya mengadopsi empat pendekatan yang berbeda. Pertama, pendekatan struktural, yang bersifat hierarkis dan terpusat, mengikuti struktur dan tahapannya secara ketat. Kedua, pendekatan prosedural dan manajerial, yang menekankan pada prosedur dan teknik yang tepat. Ketiga, pendekatan perilaku, yang mengakui peran manusia dalam pelaksanaan kebijakan. Keempat, pendekatan politik, yang mempertimbangkan faktor politik dalam memfasilitasi atau menghambat penerapan kebijakan pendidikan.

Pada tahap ini, kebijakan dilaksanakan oleh badan administrasi dan agen pemerintah di tingkat bawah.

6. Tahapan Evaluasi Kebijakan.

Evaluasi kebijakan mencakup analisis terhadap isi kebijakan, pelaksanaan, dan dampaknya (Islamy:2001, 112). Evaluasi kebijakan dirancang untuk menilai hasil program pemerintah yang memiliki perbedaan signifikan. Ini penting bagi pembuat kebijakan dan masyarakat karena membantu menilai efektivitas suatu kebijakan dan memberikan masukan berharga untuk memperbaiki kebijakan yang ada atau merumuskan kebijakan baru.

Dalam proses merumuskan kebijakan pendidikan, pendidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengenalan Masalah

Langkah pertama adalah menyadari atau merasakan adanya situasi yang dianggap sebagai masalah. Situasi ini dapat diidentifikasi dengan menemukan dan mengenali masalah yang ada.

2. Pencarian Masalah

Pada tahap ini, biasanya ditemukan sejumlah masalah yang saling terkait. Kumpulan masalah yang saling terkait namun belum terstruktur disebut meta masalah.

3. Pendefinisian Masalah

Dari sejumlah masalah yang ditemukan, perlu ditentukan terlebih dahulu masalah mana yang menjadi masalah publik. Proses ini menghasilkan masalah substantif dari kumpulan masalah yang belum terstruktur.

4. Spesifikasi Masalah

Setelah pendefinisian masalah, langkah selanjutnya adalah melakukan spesifikasi masalah untuk menghasilkan masalah formal sebagai masalah kebijakan.

5. Perancangan Tindakan

Setelah terbentuknya masalah formal, tahapan berikutnya adalah perancangan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan solusi terhadap masalah kebijakan tersebut. Proses ini dikenal sebagai "usulan

kebijakan" (*policy proposal*), yang melibatkan penyusunan dan pengembangan serangkaian tindakan untuk mengatasi masalah tertentu.

D. Teknik Analisis Kebijakan

1. Analisis SWOT

Menggabungkan kebijakan pendidikan provinsi dengan analisis SWOT menjadi karya yang rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan didasarkan pada analisis SWOT yang komprehensif. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan akan melibatkan pembentukan strategi melalui pengembangan program, penyusunan anggaran, dan prosedur.

Fokus utama dari analisis SWOT adalah untuk mendukung pemahaman yang lebih baik tentang semua faktor yang bisa memengaruhi perencanaan strategis dan keputusan bisnis. SWOT digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan membantu dalam menetapkan standar keberhasilan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang berdasarkan pada analisis SWOT meliputi pemantauan, evaluasi, dan penetapan standar keberhasilan dalam implementasi kebijakan pendidikan di tingkat provinsi, serta menetapkan tujuan, program, dan sasaran pendidikan.

2. Analisis CBA (*Cost Benefit Analysis*)

CBA (*cost benefit analysis*) bertujuan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai alternatif. Dengan membandingkan manfaat dan biaya dari berbagai alternatif, alternatif yang direkomendasikan biasanya adalah yang memiliki manfaat terbesar dengan biaya terendah. Karena sulitnya mengukur manfaat secara langsung, terkadang manfaat digantikan dengan konsep keefektifan. Dalam konteks ini, hal tersebut dikenal sebagai analisis efektivitas biaya.

KESIMPULAN

Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu proses untuk menghasilkan informasi terkait pendidikan, menggunakan data sebagai salah satu masukan untuk menyusun berbagai alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang memiliki sifat politis untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang pendidikan. Menurut Dunn (2000:24), proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan terdiri dari tahap identifikasi masalah, pengaturan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan

Selain itu, Teknik yang digunakan untuk menganalisis kebijakan Pendidikan ada dua, diantaranya analisis SWOT sebagai alat manajemen perencanaan strategis yang ditunjang oleh sumber daya pendidikan mencakup pendidik, anggaran, sumber daya manusia, sapras, silabus, kesejahteraan pendidik, dan penempatan pendidik. Serta CBA (*cost banefit analysis*) yang bertujuan untuk membandingkan biaya dan manfaat yang terdapat dalam satu alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Samudra Biru.
- Rusdiana, A. (2023). Hand Out: *Kebijakan Pendidikan Semester VI Tahun Akademik 2022-2023*.
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195-224.
- Darwansyah, S., Chaifudin. (2020) Kebijakan Dalam Pendidikan. *At-Thullab: Jurnal of Islamic Studies*, 116–133.
- Sutapa, M. (2005). Buku Pegangan Kuliah; Analisis Kebijakan Pendidikan (Suatu Pengantar).
- Basyarahil, A. (2011). Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan. *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara. Tahun II, Nomor, 2*, 3-18.
- Setiawan, F., Saputra, R., Yuliatin, A. T., & Ilham, M. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 4(2), 362-365.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67-71.